

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki penduduk sebesar 258.704.986 jiwa pada tahun 2016. Dalam negara berkembang ini terdapat masalah tentang kesejahteraan mulai dari segi ekonomi, segi sosial, segi budaya, segi pendidikan dan Lain sebagainya. Kepala Badan Pusat Statistik memaparkan bahwa jumlah tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 5,5 persen atau sekitar 7,02 juta (Roszandi, 2017).

Surabaya adalah kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Dikenal sebagai kota Metropolitan merupakan memiliki tata kota strategis dalam proses pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Suharto Wardoyo menyatakan bahwa Penduduk Surabaya mencapai 3.016.653 jiwa pada 2016 angka peningkatan ini berasal dari perpindahan penduduk, kedatangan dari negara lain ke Indonesia dan meningkatnya angka kelahiran. Surabaya memiliki jumlah pengangguran hingga akhir tahun 2015 mencapai 83.000 lebih, namun hingga pemeriksaan tahun 2016 pihaknya beralasan di kota Surabaya, banyak yang tercatat sebagai pengangguran tetapi memiliki kegiatan usaha kreatif yang menghasilkan. Dari dinas tenaga kerja disebut hanya yang bekerja di perusahaan, instansi, dan swasta lainnya, tapi yang tercatat di industri kreatif tidak ada (Zumrotus, 2016).

Dari jumlah angka pengangguran di Surabaya pada tahun 2016 tersebut memiliki salah satunya masalah yaitu ketidakmerataan pembangunan ekonomi atau kurangnya lapangan pekerjaan. Dalam memajukan ekonomi secara substansial, pemerintah harus

mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik yang efektif dengan cara menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil. Pengangguran dan ketimpangan pendapatan merupakan masalah sosial yang harus diselesaikan serta menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat sipil (Djalal, 2014).

Solusi dari pemerintah untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran menggunakan pendekatan kewirausahaan. Kewirausahaan sebagai salah satu membangun dan mengembangkan perekonomian masyarakat, dengan gaya manajemen berorientasi aksi yang menggunakan inovasi dan perubahan sebagai fokus pemikiran dan perilaku. Dari sinilah pemerintah menggunakan pendekatan kewirausahaan sebagai pembangunan perekonomian yang disebut dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau ekonomi kreatif. Program ekonomi kreatif ini diharapkan dapat menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian nasional (RPJMN, 2005: 213).

Dalam program ekonomi kreatif ini dapat mengembangkan masyarakat, sehingga dapat memunculkan daya saing baik nasional maupun internasional. Pemerintah menciptakan ekonomi kreatif memiliki peranan dalam membangun perekonomian. Terbukti Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menjelaskan, berdasarkan data BPS 2016 dengan jumlah penduduk 252 juta, jumlah wirausaha non pertanian yang menetap mencapai 7,8 juta orang atau 3,1%. Dengan demikian, tingkat kewirausahaan Indonesia telah melampaui 2% dari populasi penduduk sebagai syarat minimal suatu masyarakat akan sejahtera (RPJMN, 2005: 213).

Selain munculnya ekonomi kreatif dari pemerintah adapun peran sektor swasta yang dibutuhkan untuk membantu pemerintah dalam

mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan menerbitkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penanaman modal dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk mengeluarkan dana tanggung jawab dari sektor swasta.

Dari penyelesaian masalah sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor swasta, perlu dibutuhkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas SDM ini dapat menunjang produktivitas daya manusia. Agar dapat menumbuh dan mengembangkan produktivitas SDM perlu diberikannya pelatihan keterampilan, sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Masyarakat harus aktif dalam mengikuti pelatihan yang diberikan oleh lembaga swasta ataupun pemerintah.

Pelatihan dan pengembangan yang diberikan kepada masyarakat sipil juga membantu pekerjaan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian semangat kewirausahaan telah mendorong munculnya usaha-usaha kecil dan menengah (UMKM) atau ekonomi kreatif yang memproduksi secara lokal, namun mampu menghasilkan produk yang mengglobal seperti di Taiwan dan China. Bahkan beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia (Ikah, 2016).

Menurut Menkop Puspayoga, bahwa tumbuhnya wirausaha tak lepas dari peran masyarakat bersama pemerintah yang terus mendorong, juga swasta dan kalangan mahasiswa atau kampus. Menurut dia, juga mengajak mahasiswa peminat wirausaha untuk memanfaatkan skim kredit murah seperti KUR dengan suku bunga 9%, LPDB dengan suku bunga 0,2%-0,3% per bulan ataupun yang sekarang baru diluncurkan kredit ultra mikro dengan maksimum pinjaman Rp 10 juta. Namun dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Surabaya masih belum teratasi dari sektor pemerintah, swasta dan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena

itu perlu diciptakan lembaga pemberdayaan masyarakat atau kewirausahaan sosial (Budiman, 2017).

Dari beberapa solusi dalam pengentasan kemiskinan yang diberikan kepada masyarakat belum bisa mengatasi masalah sosial secara menyeluruh. Dalam hal ini pengentasan kemiskinan belum bisa terselesaikan yaitu: Pertama, pemerintah dapat berperilaku tidak efisien, lambat dalam bertindak, rentan terhadap tindak korupsi, birokratis, serta adanya kepentingan individual yang selalu melekat. Kedua, pemerintah seringkali memiliki kemampuan yang baik dalam membuat suatu kebijakan, namun tidak ketika mengeksekusinya. Pemerintah juga tidak memiliki tekad yang kuat ketika ingin menghentikan suatu program pengentasan kemiskinan karena tidak lagi dibutuhkan atau justru menjadi beban bagi keuangan pemerintah. Ketiga, lingkungan pemerintah tidak terlepas dari politik. Politik seringkali mewarnai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah (Yunus, 2007).

Dengan ini perlunya diciptakan lembaga pemberdayaan masyarakat adalah untuk memfasilitasi masyarakat yang diberdayakan, sehingga tanpa campur tangan dari pemerintah. Pemberdayaan masyarakat atau kewirausahaan sosial penting dilakukan bertujuan yang tidak semata berorientasi pada *profit*, melainkan juga pada tujuan sosial untuk memberdayakan masyarakat (Yunus M., 2007). Menkop Puspayoga juga memaparkan: “Pengusaha muda harus menjadi social entrepreneur, yang tidak mengejar keuntungan semata, namun juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar” (Budiman, 2017).

(*Socio Entrepreneurship*) kewirausahaan sosial merupakan sebuah istilah turunan dari kewirausahaan. Gabungan dari dua kata, *socio* yang artinya kemasyarakatan, dan *entrepreneurship* yang artinya kewirausahaan.

Pengertian sederhana dari *Socio Entrepreneur* adalah seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan *entrepreneurship* untuk melakukan perubahan sosial (*social change*), terutama meliputi bidang kesejahteraan (*welfare*), pendidikan dan kesehatan (*healthcare*). Dengan munculnya keberbedaan menjadi menarik karena *entrepreneurship* (kewirausahaan) yang hanya semata-mata karena profit dan hanya membangun perekonomian masyarakat tetapi, *Social Entrepreneurship* (kewirausahaan sosial) merupakan proses pembinaan atau pendampingan untuk mewujudkan misi sosial dan membangun perekonomian masyarakat (Santosa, 2007).

Salah satu lembaga pemberdayaan masyarakat yaitu lembaga di Yayasan X. Yayasan X sebagai lembaga yang memberdayakan masyarakat agar mencapai kesejahteraan bersama. Terbukti pada visi yang dicantumkan “Masyarakat humanis, sejahtera, berkeadilan, dan solider berlandaskan semangat cinta kasih”. Selain visi adapun misi yang dilakukan yayasan X, sebagai berikut: (1) Menyelenggarakan pendampingan dan pembinaan bagi kaum miskin terutama bagi anak-anak terlantar, (2) Menyelenggarakan pelatihan, sarahsehan dalam rangka menanamkan dan menyebarkan kepedulian serta keterlibatan sosial, dan (3) Menyelenggarakan dukungan dari terlibat langsung dalam penanganan bencana alam.

Yayasan X dibentuk secara operasional dimulai menjelang pertengahan tahun 2011 Yayasan ini menjadi payung bagi lembaga-lembaga karya sosial para imam dan bruder CM di kota Surabaya. Yayasan X disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.454.AH.01.04 Tahun 2010. Yayasan X ini memiliki divisi-divisi antara lain (1) WADAS merupakan lembaga pendampingan buruh industri dan perkebunan, (2) SMM merupakan

lembaga komunitas kecil kaum muda yang mendampingi anak-anak pinggiran, (3) SRK merupakan relawan tanggap bencana, dan (4) PPS merupakan divisi penelitian dan pengembangan kepedulian sosial.

Dalam melakukan praktik *Socio Entrepreneurship* di Yayasan X yang dibentuk oleh Yayasan X ini tidak lepas dari para pelaku kewirausahaan sosial. Fenomena tersebut juga ditemukan oleh peneliti pada wawancara bersama salah satu staf koordinasi lapangan di Yayasan X. Hal ini ditunjukkan melalui hasil wawancara:

*“yang dikatakan pemberdayaan masyarakat sesuatu bentuk kegiatan yang memang pertama berbasis masyarakat, kedua keterlibatan masyarakat. jadi unsurnya itu sesuatu hal yang berkaitan dengan masyarakat itu sendiri dari pendidikan dari mengerjakan sesuatu sampai pada nantinya bisa ada perubahan dari struktural masyarakat itu sendiri. itu pemberdayaan”*

Uraian diatas menurut salah satu staf koordinasi lapangan tentang *Socio Entrepreneurship* di Yayasan X cukup sederhana dalam memaknai kewirausahaan sosial yaitu dengan menggunakan budaya sebagai pembelajaran, melibatkan orang tua dengan lingkungan, dan mengajak orang tua mencapai solusi masa depan anak-anak serta mencapai kesejahteraan bersama. Dalam melakukan praktik *Socio Entrepreneurship* adanya keterlibatan para relawan dalam melakukan proses pendampingan masyarakat atau relawan lapangan.

Relawan lapangan atau *direct service volunteers* merupakan relawan yang ikut terlibat dalam aktivitas pelayanan seperti konseling, rekreasi, dan pengajaran. Dalam sebuah pemberdayaan diperlukan jenis relawan seperti *direct service volunteers* atau relawan lapangan (Mitchell, 2005).

Relawan diartikan sebagai dua kata yang berbeda yaitu (suka dan rela). Jadi, relawan adalah melakukan segala sesuatu aktivitas atau kegiatan dengan sukarela dan tidak ada keterpaksaan. Dipilihnya jenis relawan lapangan ini karena membutuhkan tenaga, waktu, pengajaran, dan tidak semata mata berorientasi pada profit melainkan tujuan sosial. Selain hal itu, peneliti memilih yayasan X sebagai tempat penelitian karena relawan lapangannya keluar dan masuk. Yang dimaksudkan peneliti relawan yang keluar disini merupakan relawan yang tidak memberikan kabar kepada pihak yayasan X bila mengundurkan diri. Pada kenyataannya ada relawan yang bertahan lebih dari 3 bulan. Dalam praktik kewirausahaan sosial telah memainkan peran penting dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dalam menghadapi penyakit sosial dengan melalui gagasan atau model baru dalam bentuk pengentasan kemiskinan, penciptaan kekayaan, peningkatan kesejahteraan, pelestarian lingkungan, serta pendampingan hukum (advocacy) (Bornstein & S. Davis, 2006). Hal ini diungkapkan juga oleh salah satu staf koordinasi lapangan di yayasan X yang diwawancarai oleh peneliti:

*“sudut pandang kesejahteraan bagiku kan banyak, karena setiap orang itu memiliki kesejahterannya masing-masing ada yang mengukur kesejahteraan dengan tidak mempunyai apa apa tapi dia merasa ada misalnya kebutuhan apa sekolah kebutuhan sehari hari bekerja itu juga mereka ada juga tidak berutang tapi cukup itu ada yang merasa sejahtera. ada juga orang yang sejahtera ketika mempunyai rumah harus bermobil ee... anaknya sekolah setinggi-tinggi mungkin jadi tergantung ukuran kesejahteraan itu. karna kembali kepada individu masing-masing ada itu sejahtera ketika didalam keluarga dia menemukan kenyamanan tidak ada masalah tidak pernah ada yang keluarga itu satu sama lain itu bertengkar enak enak saja semua bisa saling mengerti itu juga bisa dikatakan sejahtera”*

Uraian diatas menurut salah satu staf kordinasi lapangan di Yayasan X cukup relatif dalam memaknai kesejahteraan karena ia memberikan informasi berdasarkan pengalamannya seperti kesejahteraan secara materi, ketika berkecukupan, dan rukun dalam keluarga. Dalam hal ini kesejahteraan yang ditekankan pada peneliti lebih menekankan pada kesejahteraan psikologis. pada dasarnya menurut jurnal penelitian (Wikanestri, dan Prabowo, 2015) "*Psychological well being* pada pelaku wirausaha" menunjukkan bahwa kategori *psychological well being* tinggi karena dilihat dengan jumlah pendapatan yang tinggi. Peneliti memilih yayasan X karena terdapat relawan lapangan yang bertahan lebih dari 3 bulan meskipun banyak relawan lapangan yang keluar masuk. Oleh sebab itu, kekhasan dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui *psychological well being* pada relawan lapangan pelaku *socio entrepreneurship* yang tidak lagi melihat tinggi dan rendahnya profit, melainkan fokus pada *psychological well being* pada relawan lapangan pelaku *socio entrepreneurship* di yayasan X.

Dengan demikian, peneliti tertarik ingin meneliti "Studi Kuantitatif Deskriptif *Psychological Well Being* pada Relawan Lapangan Pelaku *Socio Entrepreneurship* di Yayasan X".

## **1.2. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah untuk melihat *psychological well being* pada semua relawan lapangan pelaku *Socio Entrepreneurship* di Yayasan X.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti dapat merumuskan masalah pada penelitian ini adalah “bagaimana gambaran kuantitatif deskriptif tentang *psychological well being* pada relawan lapangan pelaku *Socio Entrepreneurship* di yayasan X?”

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah menggambarkan secara kuantitatif deskriptif *psychological well being* pada relawan lapangan pelaku *Socio Entrepreneurship* di yayasan X berdasarkan studi kuantitatif deskriptif.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1. Manfaat teoritis**

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan memperkaya teori psikologi sosial terutama bidang pemberdayaan masyarakat (kewirausahaan sosial), kesejahteraan psikologis (*Psychological well being*).

##### **1.5.2. Manfaat praktis**

###### **1.5.2.1. Bagi peneliti**

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah peneliti dapat mengetahui gambaran kesejahteraan psikologis para relawan lapangan pelaku *Socio Entrepreneurship* di yayasan X.

###### **1.5.2.2. Bagi relawan yang menjadi informan**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan merefleksikan *psychological well being* informan. Selain hal itu, informan dapat mengevaluasi *psychological well being* sebagai relawan lapangan pelaku *Socio Entrepreneurship* di yayasan X.

manfaat secara spesifik dengan apa yang dilakukan selama pemberdayaan dan mengetahui kesejahteraan psikologis yang dialami oleh relawan pelaku *Socio Entrepreneurship* di Yayasan X. Kemudian, para relawan yang menjadi informan dapat merefleksikan dan mengetahui kesejahteraan psikologi.

#### 1.5.2.3. Bagi relawan yang tidak menjadi informan

Manfaat penelitian ini dapat menjadikan gambaran maupun pengetahuan kesejahteraan psikologis pada relawan yang menjadi informan di yayasan X, sehingga dari relawan yang menjadi informan di yayasan X ini dapat memberikan dorongan atau motivasi untuk mengembangkan *socio entrepreneurship* bagi relawan yang tidak menjadi informan.

#### 1.5.2.4. Bagi Yayasan X

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau jawaban mengenai psychological well being relawan lapangan pelaku *socio entrepreneurship* yang telah melakukan pendampingan di masyarakat. Yayasan X dapat melihat dan mengetahui bentuk kesejahteraan psikologis yang dialami para relawan lapangan pelaku *socio entrepreneurship*, sehingga dapat merefleksikan dengan adanya relawan yang menjadi informan.